

Judul : Redam gejala pada masa transisi
Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Redam Gejala pada Masa Transisi

KESINAMBUNGAN dan keberlanjutan fiskal merupakan hal penting untuk menjaga perekonomian Indonesia. Karenanya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat juga diperlukan agar tujuan jangka panjang pembangunan dapat terealisasi.

Komitmen tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau pemerintahan baru yang akan dikemukakan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kesehatan fiskal berulang kali dinyatakan menjadi prioritas melalui pengendalian defisit anggaran yang tak akan melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam pembahasan rancangan APBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kisaran angka yang akan dijadikan patokan pada APBN tahun depan. Dari hal itu, anggaran negara masih memainkan perannya sebagai peredam kejut (*shock absorber*) atas ketidakpastian perekonomian global.

Sejauh ini, postur RAPBN 2025 yang disepakati ialah pendapatan negara di kisaran 12,30% hingga 12,36% terhadap PDB, belanja negara 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB, dan defisit anggaran berkisar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Sementara itu, untuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, kesepakatan yang dicapai ialah tingkat kemiskinan berkisar 7% hingga 8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, indeks rasio gini 0,379 hingga 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 4,5% hingga 5,0%.

Lalu, indeks modal manusia 0,56%, penurunan gas emisi rumah kaca 38,6, indeks nilai tukar petani 115 hingga 120, dan indeks nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Adapun asumsi makro RAPBN 2025, pertumbuhan ekonomi disepakati berkisar 5,1% hingga 5,5%.

Selain pertumbuhan ekonomi, kesepakatan asumsi makro untuk RAPBN 2025 juga mencakup tingkat inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.300 hingga Rp15.900 terhadap dolar AS, tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun 6,9% hingga 7,2%.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$75 hingga US\$85 per barel, *lifting* minyak bumi 580 ribu barel per hari hingga 605 ribu barel per hari, dan *lifting* gas bumi 1.003 hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan APBN 2025 telah memperhitungkan berbagai macam faktor, dari transisi pemerintahan hingga kondisi ekonomi dalam negeri atau global. "Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," kata dia.

"Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan bapak presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025

menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih," tambahnya.

Sri Mulyani menerangkan situasi ekonomi makro yang amat memengaruhi APBN 2025 ialah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga *lifting* minyak, serta *lifting* gas.

Namun, dia tetap memastikan proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.

Sedianya Sri Mulyani telah berulang kali menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2025 akan banyak mempertimbangkan ihwal transisi pemerintahan dan menjadi titik awal bagi pencapaian visi Indonesia emas 2045.

Dia menilai APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Menkeu menekankan dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa," terangnya.

Program presiden terpilih

Keberlanjutan dan kesinambungan APBN 2025 juga telah dipastikan oleh Wakil Menteri Keuangan II sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan Thomas Djiwandono. Ia mengatakan anggaran negara yang sedang disusun saat ini akan selaras dengan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Semua hal yang menyangkut anggaran, terutama pada 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," terang Thomas.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur RAPBN 2025 yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah dan parlemen dapat menjawab tantangan ekonomi pada tahun depan. "Saya berkeyakinan dengan postur RAPBN 2025 itu, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi kita ke depan," ujarnya.

"Belanja negara RAPBN 2025 akan memberikan dukungan anggaran untuk program Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun," kata Said. (Mir/E-2)